

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)

¹Budiman Slamet, ²Nadia Dwi Irmadiani

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
e-mail: budiman.sl1954@gmail.com

²Program Studi Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas 17 Agustus, Semarang, Indonesia
e-mail: nadianadio88@gmail.com

ABSTRAKSI

Kualitas laporan keuangan daerah adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu pemerintah daerah dimana didalamnya memiliki informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan menyebarkan kuesioner melalui link google form kepada 78 responden.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25, metode statistik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda serta uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Ku

ABSTRACT

The quality of regional financial statements is a structured report on the financial position, transactions and performance of local governments in which information is easily understood and can be used for decision making in the future. Quality financial reports must meet the characteristics of being relevant, reliable, accessible and comparable.

The purpose of this study is to analyze the impact of regional financial accounting systems and regional financial management on the quality of regional financial statements. The research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Cianjur Regency by distributing it via a google form link to 78 respondents.

The method of analysis used in this research is verification with explanatory survey research methods. The data was tested using SPSS version 25, descriptive statistical analysis method, data quality test using validity and reliability tests, classical assumption test with normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, hypothesis testing namely multiple linear regression analysis and t test, F test and the coefficient of determination test.

Partial testing with t-test shows that the implementation of regional financial accounting systems has a positive effect on the quality of regional financial reports and regional financial management has a positive effect on the quality of regional financial reports. This shows that the

higher the application of regional financial accounting systems and regional financial management, the better the quality of regional financial reports. Simultaneous test results with the F test, namely the application of regional financial accounting systems and regional financial management together have a positive effect on the quality of regional financial reports.

Keywords: *Financial Accounting System, Financial Management, Financial Report Quality*
alitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal (Defitri, 2018).

Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah yaitu dengan diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi merupakan bentuk pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan manajerial terhadap urusan di daerahnya yang dapat pula menyangkut pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah (Pratama, 2015 dalam Lutfiyanti, 2018).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri, 2014 dalam Defitri 2018), untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam

pengelolaan keuangan daerah (Defitri et al., 2016 dalam Defitri, 2018).

Lutfiyanti (2018) menyatakan bahwa "Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan." Patra et al., 2015 dalam Lutfiyanti (2018) menyatakan bahwa "Laporan keuangan bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas."

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaporan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta terbebas dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan dinilai berupa Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Opini Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tahun 2019, menunjukkan bahwa 485 LKPD memperoleh opini WTP, 50 LKPD memperoleh opini WDP, dan 6 LKPD memperoleh opini TMP/Disciaimer Opinion. LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan tahun 2018 yang hanya 443 LKPD menjadi 485 LKPD. Fenomena lain tentang kualitas laporan keuangan daerah yaitu, setelah pada tahun 2018 mendapatkan hasil pelaporan WDP

Tabel 1 Daftar Opini BPK untuk LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Kabupaten Bogor
1.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2018	Wajar Dengan Pengecualian
5.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : LHP LKPD Kabupaten Bogor 2015-2019, IHPS www.bpk.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bogor pada 2015-2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2018 mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2019 mendapatkan kenaikan opini kembali menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan opini tersebut disebabkan karena beban hibah untuk sarana dan prasarana SMP swasta tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik dikarenakan hasil dari kinerja pemerintahan yang di periksa oleh BPK masih mengalami beberapa catatan yang kurang baik serta masih mengalami kenaikan dan penurunan opini yang belum stabil. Laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu perlu adanya suatu sistem yang dapat menjadi landasan bagi entitas dalam menjalankan kegiatannya. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Bogor untuk pelaporan anggaran tahun 2019 meningkat menjadi penilaian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan uraian dari fenomena dan penelitan yang telah dipaparkan bahwa ada keterkaitan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dari penelitian sebelumnya di salah satu pemerintah daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Alasan pemilihan tempat yaitu karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan opini pada tahun 2019 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu peneliti ingin mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Bogor telah memenuhi indikator dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen komputer atau komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi (Gelinas, Sutton and Hunton, 2016).

Mulyadi (2016) menyatakan bahwa "Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012 dalam Mokoginta et al., 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Erlina dan Rasdianto, 2013 dalam Lutfiyanti, 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang

dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat (Defitri, 2018).

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.”

Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan, atau investasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordawan et al., 2012 dalam Lutfiyanti, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam berbagai hal. Untuk mendapatkan hasil laporan

keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009 dalam Lutfiyanti, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanti (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) dengan variabel yang sama membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikah et al, (2016) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Hanifa et al., (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean government), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikah et al., (2016) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2014) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan

peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana (Defitri, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Darmawan et al., (2014) dengan variabel independen yang sama yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu merupakan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian explanatory survey. Metode penelitian explanatory survey adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel bebas

(variabel independen), sedangkan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya media perantara. Data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi jawaban dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dalam format link *google form* untuk diisi oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bogor dengan menggunakan Skala Likert.

Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang akan penulis gunakan yaitu didasarkan pada metode non probability sampling, yaitu suatu teknik dalam pengambilan sampel yang tidak dapat memberikan suatu peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik tersebut yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu, sehingga semua populasi yang memenuhi karakteristik yang ditentukan akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Analisis Statistika Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas. Sedangkan, Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t), Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji F), dan Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas ini yaitu dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid yaitu apabila pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner yang berkaitan.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel peerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah memperoleh nilai rhitung > rtabel maka masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu merupakan indeks dalam mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang memberikan suatu hasil yang konsisten. Apabila semakin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka akan semakin reliabel alat pengukur. Besar kecil nya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indeks korelasi.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (ditabung)			rtabel	Keterangan
		X1	X2	Y		
1.	Pernyataan 1	0,721	0,597	0,534	0,268	Valid
2.	Pernyataan 2	0,751	0,813	0,541	0,268	
3.	Pernyataan 3	0,594	0,783	0,738	0,268	Valid
4.	Pernyataan 4	0,634	0,883	0,445	0,268	
5.	Pernyataan 5	0,736	0,911	0,843	0,268	Valid
6.	Pernyataan 6	0,626	0,846	0,460	0,268	
7.	Pernyataan 7	0,717	0,519	0,832	0,268	Valid
8.	Pernyataan 8	0,690	0,644	0,663	0,268	
9.	Pernyataan 9	0,694	0,666	0,675	0,268	Valid
10.	Pernyataan 10	0,721	0,670	0,639	0,268	
11.	Pernyataan 11	0,767	-	0,663	0,268	Valid
12.	Pernyataan 12	0,651	-	-	0,268	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel penelitian yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner penelitian reliabel sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov Smirnov Test dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,19806734
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,076
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4, diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,079. Dikarenakan nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau ($0,079 > 0,05$) maka berarti data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dapat dinamakan problem multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila terbukti adanya multikolinearitas sebaiknya untuk salah satu dari variabel independen yang ada harus dikeluarkan dari model, dan pembuatan regresi dapat diulang kembali. Gejala adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan pearson correlation dan tolerance value serta Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,889	1,125
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,889	1,125

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,889 dimana hal tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar $1,125 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengandung multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang Homoskedastisitas atau tidak ada Heteroskedastisitas.

Gambar 1 Diagram Scatterplot

Sumber : Data Primer, 2021

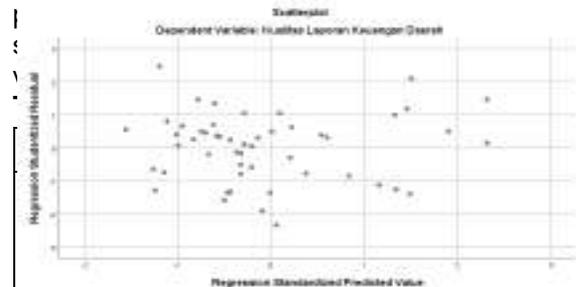
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu merupakan suatu metode statistika umum yang dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	15,988		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,393	,097	,462	4,044	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,219	,080	,312	2,732	,009

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah



Model		Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	15,988	4,904		3,260	,002
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,393	,097	,462	4,044	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,219	,080	,312	2,732	,009

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer, 2021

Hasil Uji F

Uji Koefisien Regresi secara Simultan atau Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji F

Sumber: Data Primer, 2021

Dari tabel tersebut diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 15,988 + 0,393X_1 + 0,219X_2 + e$$

Hasil Uji t

Uji Koefisien Regresi Parsial atau Uji t yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,407	,384	3,260
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah				

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,638 atau 63,8% hal ini berarti kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 63,8% dan sisanya 36,2% dipengaruhi oleh indikator dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Interpretasi Hasil Penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis pertama (H1) yang diajukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji t penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 4,044 atau thitung lebih besar dari ttabel (4,044 > 1,673) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah atau

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	372,769	2	186,384	17,536	,000 ^b
	Residual	542,065	51	10,629		
	Total	914,833	53			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah						

dengan kata lain jika pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan meningkat, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis kedua (H2) yang diajukan yaitu pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji t pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,732 atau thitung lebih besar dari ttabel (2,732 > 1,673) dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,009 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah atau dengan kata lain jika akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian meningkat, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis ketiga (H3) yang diajukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji F penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai F hitung sebesar 17,536 atau Fhitung lebih besar dari Ftabel (17,536 > 3,18) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor cukup baik dengan indikator pengukuran yang digunakan pada setiap variabel.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020-2021 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020-2021. Namun mengenai indikator pencatatan dalam hal pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan

dengan fakta/keadaan keuangan yang ada dan indikator pelaporan dalam hal pelaporan yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020-2021. Namun mengenai indikator kejujuran dalam mengelola keuangan publik perihal instansi jujur dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan masih harus ditingkatkan lagi.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020-2021.

Saran

- Untuk kegunaan akademik/teoritik penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi keuangan, bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

- Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya melakukan penelitian dengan indikator penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah saja tetapi menambahkan dengan indikator lain yaitu pendidikan dan pelatihan serta komitmen pimpinan daerah sehingga hasil penelitian yang di dapat lebih akurat.

- Untuk kegunaan praktik yaitu bagaimana hasil penelitian ini dapat dipakai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Dalam rangka

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah perlu dilakukan DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) kepada staff BPKAD Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal ketelitian dalam proses penginputan data dan menggunakan sistem pengendalian pemerintahan untuk pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kejujuran dalam mengelola keuangan publik serta melakukan evaluasi pengelolaan keuangan setiap bulannya.

REFERENSI

1. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
2. BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020. Tersedia di: <https://www.bpk.go.id/ihips> [Diakses pada 19 Maret 2021].
3. Chabib, S. (2010). Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung. Bandung: Fokus Media.
4. Cianjur Ekspres. 2021. Cianjur Hanya Dapat WDP Dampak Adanya OTT Terhadap Bupati Terkait DAK. [Cianjurekspres.net](http://cianjurekspres.net), hal. 1, kol. 1-5. Tersedia di: <https://www.cianjurekspres.net/cianjur-hanya-dapat-wdp/> [Diakses pada 20 Maret 2021].
5. Darmawan, N.A.S. et al., (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, [online] Volume 2, No. 1, Tahun 2014. Tersedia di: <http://ejournal.undiksha.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
6. Defitri, S.Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Media Ekonomi, [online] Volume 22 (1), 53-72, 2014. Tersedia di: <http://www.neliti.com> [Diakses pada 29 Maret 2021].
7. Defitri, S.Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita, [online] Volume 3(1) Februari 2018, p. 64-75. Tersedia di: <http://ejournal.ildikti10.id> [Diakses pada 29 September 2020].
8. Defitri, S.Y. et al., (2016). The Effect Knowledge of Budget and Job Relevant Information on Asymmetry Information. Jurnal European Academic Reseachr, [online] Volume IV(4) July 2016. Tersedia di: <http://repository.upiypk.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
9. Erlina, dan Rasdianto. (2013). Akuntansi Keuangan Berbasis Akruar. Medan : Brama Ardian.
10. Gelinas., et al. (2016). Accounting Information System. 10 Edition. South-Western. USA.
11. Halim, Abdul et al., (2012). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
12. Hanifa, L. et al., (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, [online] Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN 2502-5171. Tersedia di: <http://ojs.uho.ac.id> [Diakses pada 17 Maret 2021].
13. Harefa, T. (2014). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Jurnal Akuntansi, [online]. Tersedia di: <http://elib.unikom.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
14. Hery. (2019). Analisis Laporan Keuangan Intergrated and Comprehensive Edition. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
15. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
16. Indrayani, K.D. dan Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, [online] Volume 4, No. 1, hal. 1-16, Juli 2020. Tersedia di: <http://journal.umy.ac.id> [Diakses pada 19 Maret 2021].
17. Lutfiyanti, A.R. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
 18. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
 19. Mokoginta, N., et al. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, [online] Volume 12(2), 2017, p. 874-890. Tersedia di: <http://ejournal.unsrat.ac.id> [Diakses pada 29 September 2020].
 20. Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
 21. Nordiawan, D. et al., (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
 22. Patra, A.D.A., et al. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 2(1) Februari 2015, p. 1-9. Tersedia di: <http://journal.stiem.ac.id> [Diakses pada 29 September 2020].
 23. Pratama, A.Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, [online] Volume 28, Nomor 1, Februari 2015. Tersedia di: <http://journal.um.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
 24. Ratifah, I. dan Ridwan M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, [online] Volume 11, No.1, Juni 2012, Hal 29-39, ISSN 1411-514X. Tersedia di: <http://digilib.mercubuana.ac.id> [Diakses pada 30 Maret 2021].
 25. Sari, G.I. dan Fadli. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 7, No. 3, Oktober 2017 ISSN 2303-0356, hal. 17-34. Tersedia di: <http://ejournal.unib.ac.id> [Diakses pada 18 Maret 2021].
 26. Setyowati, L. Et al., (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, [online] Volume 20, No. 2, Th. 2016: hal. 179-191. Tersedia di: <http://ojs.uajy.ac.id> [Diakses pada 18 Maret 2021].
 27. Sholikah, R.N. et al., (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, [online] Volume 12, Edisi Khusus April 2016: 168-175. Tersedia di: <http://ejurnal.unisri.ac.id> [Diakses pada 17 Maret 2021].
 28. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Bogor